

**DESENTRALISASI FISKAL DAN INKLUSIFITAS PERTUMBUHAN EKONOMI
DIKABUPATEN/KOTA DI NTB**

MURAD, AHMAD

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani
Selong, Lombok Timur**

Email : ahmadmurad2012@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis Desentralisasi Fiskal dan Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di NTB. Variabel penelitian yang digunakan dalam analisis meliputi PAD dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif dilakukan dengan pendekatan klasen yang meliputi penurunan kemiskinan, penurunan ketimpangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan pada arah hubungan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dilakukan dengan model analisis regresi sederhana dengan menggunakan metode OLS. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang mencakup periode 4 tahun (2013-2016).

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan ekonomi inklusif Kabupaten/Kota di NTB baik dalam hal penurunan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi inklusif hanya dapat dinikmati oleh golongan masyarakat menengah atas, sementara masyarakat bawah tidak dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Sementara, disisi lain peranan desentralisasi fiskal melalui pemanfaatan PAD tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif baik dalam hal menurunkan kemiskinan dan penurunan ketimpangan ekonomi kecuali pada penambahan penyerapan tenaga kerja. Dimana PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan kontribusi PAD yang kecil terhadap pembangunan ekonomi yang hanya mencapai 8 persen selama periode penelitian belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.

Kata kunci:

Inklusifitas pertumbuhan ekonomi, PAD, pendekatan Klasen dan Regresi Sederhana

ABSTRACT

This study aims to analyze Fiscal Decentralization and Inclusive Economic Growth in Regencies / Cities in NTB. The research variables used in the analysis include PAD and inclusive economic growth. Analysis of inclusive economic growth is carried out using a classy approach which includes poverty reduction, decreasing economic inequality and employment. Whereas the direction of the PAD's relationship to inclusive economic growth is done using a simple regression analysis model using the OLS method. While the data used is district / city panel data in NTB Province which covers a period of 4 years (2013-2016).

The results of the analysis show that there was no inclusive economic growth in the Regency / City in NTB both in terms of poverty reduction, economic inequality and employment. Inclusive economic growth can only be enjoyed by the upper middle class, while the lower classes cannot benefit from economic growth. Meanwhile, on the other hand the role of fiscal decentralization through the use of PAD cannot affect inclusive economic growth both in terms of reducing poverty and decreasing economic inequality except in increasing employment. Where PAD influences inclusive economic growth through employment. This is due to the small contribution of PAD to economic development which only reached 8 percent during the research period that has not been able to reach all levels of society.

Keywords : *The inclusiveness of economic growth, PAD, the Klasen approach and the Simple Regression*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu perhatian terhadap desentralisasi fiskal sebagai strategi pembangunan juga tidak hanya terbatas terhadap negara-negara berkembang, tetapi juga muncul dan menjadi agenda utama banyak negara-negara OECD (Vazquez dan McNab, 2001).

Secara prinsipil, munculnya gagasan tentang desentralisasi merupakan suatu anti thesis atas struktur politik yang sentralistis. Dengan kata lain, karena struktur politik yang sentralistis cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintah pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, dan/atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hidayat, 2005). Lebih jauh, mengutip pendapat Allen, Kuncoro (2004) menyatakan bahwa timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di Negara dunia ketiga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan ekonomi antardaerah, pengangguran dan kemiskinan Kabupaten/Kota di NTB ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan ekonomi antardaerah, pengangguran dan kemiskinan Kabupaten/Kota di NTB.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

- 1) Bagi akademis, sebagai bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu ekonomi.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya khususnya tentang tingkat kemandirian keuangan daerah.

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara otonomi dimaksudkan agar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka sistem yang dianut adalah sistem desentralisasi.

Tujuan pengembangan otonomi daerah menurut Suparmoko (2001) antara lain: memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Disisi lain masih terdapat sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi dimana pengambilan keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat dengan alasan antara lain: untuk memelihara aspek pemerintahan antar daerah, kemampuan administrasi di banyak pemerintah daerah masih lemah, masih terdapat perbedaan yang tinggi dalam kondisi dan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mengurangi gerakan separatis, dan untuk perencanaan nasional dalam pembangunan sosial ekonomi.

Dengan adanya sistem ekonomi, daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan preferensi masing-masing masyarakat. Keuntungan yang lain adalah bahwa pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri karena cakupan yang lebih sempit maka akan lebih cepat dan efisien daripada dalam cakupan yang luas. Kemudian keuntungan yang didapat dari sistem otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Akan tetapi dalam hal tertentu pemerintah daerah akan kurang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai misal bila pemerintah daerah diminta untuk menyediakan barang publik nasional, masalah retribusi penghasilan, dan pemecahan masalah ekonomi makro yang tentu saja hasilnya tidak memuaskan.

Pencapaian tujuan otonomi daerah tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah dan terutama sumber daya manusia yang tentunya akan berperan sebagai motor penggerak jalannya pemerintah daerah. Pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya secara adil dan selaras. Peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga perlu diperhatikan.

2.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan

maupun aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik (Prawirasetoto, 2002). Namun banyak ahli yang memberikan definisi mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dijelaskan oleh Bird dan Villancourt (2002) mencakup tiga macam derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) dimana bukan saja implementasi yang diberikan kepada daerah, tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan pemerintah daerah.

Sementara disisi lain, Bigday (2000) dalam Sarana (2005) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal lebih mengacu pada desentralisasi sektor publik. Barang-barang publik di tingkat daerah yang berfungsi memperlancar aktivitas masyarakat lokal dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik disediakan oleh pemerintah dengan pembiayaan dari pajak dan retribusi daerah. Namun bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan begitu saja, pengeluaran barang publik di daerah yang manfaatnya lebih bersifat umum bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara tetap merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Komponen utama desentralisasi adalah desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya diberi kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran sektor publik. Hal ini perlu dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal terutama mencakup:

1. *Staff financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama pengenaan retribusi daerah.
2. *Cofinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
3. Peningkatan PAD melalui penambahan kewenangan pengenaan pajak daerah terutama pajak properti (PBB), pajak penghasilan perseroaan (PPH pribadi), cukai atas berbagai komoditas atau berbagai jenis retribusi daerah.
4. Transfer pemerintah pusat terutama yang berasal dari DAU, DAK, sumbangan darurat dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
5. Kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman.

Elemen lain yang penting dalam desain desentralisasi secara komprehensif dipandang dari perspektif pemerintah yaitu desentralisasi ekonomi yang dilaksanakan melalui kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

2.3 Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah

Salah satu upaya negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah/wilayah tentunya melalui pemerataan pembangunan pada daerah-daerah. Pembangunan regional merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Dengan demikian diharapkan hasil pembangunan akan dapat terdistribusi dan teralokasi ke tingkat regional. Dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah, terutama dalam pembangunan ekonominya, dibutuhkan beberapa kebijakan dan program pembangunan daerah yang mengacu pada kebijakan regionalisasi atau perwilayahan.

Ketimpangan Ekonomi antarwilayah adalah perbedaan tingkat PDB per- kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antarwilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada pula yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada

perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor infrastruktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah kepada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan wilayah yang seimbang adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/daerah belakang sehingga taraf hidupnya sejajar atau setara dengan taraf hidup penduduk di wilayah perkotaan/maju melalui pembangunan sektor pertanian, industri, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Alam, 2006).

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar daerah di Indonesia adalah (Yadiansyah, 2007), yang pertama konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terpusat di pulau jawa, sehingga membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi provinsi diluar jawa, khususnya Indonesia Bagian Timur. Kedua, alokasi investasi. Pola distribusi nilai tambah industri antar daerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Terpusatnya investasi di pulau jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar jawa (Tambunan, 1996). Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar pulau. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar daerah.

Keempat yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran "klasik" sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDAny akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik di banding daerah diluar jawa yang miskin SDA, tetapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi. Kelima adalah perbedaan kondisi demografis antardaerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Ketidaklancaran ini disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi, perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input antara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa jadi terganggu.

Ray (1998), mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antar golongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antar

daerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan dapat di lihat dari segi perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. dari dua indikator, yang pertama perbandingan antara tingkat pendapatan per-kapita di daerah perkotaan dan pedesaan. Kedua, disparitas dilihat dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan (perbedaan dalam pendapatan rata-rata antara kedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antar daerah adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antar daerah.

Secara teoritik, permasalahan kesenjangan ekonomi antarwilayah juga dapat dijelaskan menggunakan Hipotesis Neoklasik. Penganut Hipotesis Neoklasik menyatakan pada permulaan proses pembangunan suatu negara, kesenjangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai kesenjangan tersebut mencapai titik puncak. Bila proses pembangunan berlanjut, maka secara berangsur-angsur kesenjangan ekonomi antar wilayah akan menurun. Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai di NSB, peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedang daerah yang tertinggal tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas SDM karena pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan maka kesenjangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat.

Keadaan yang berbeda terjadi di negara maju dimana kondisi daerahnya umumnya dalam kondisi yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitas SDM. Dalam kondisi demikian, setiap peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antar daerah. Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antardaerah (Williamson, 1997).

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan ketimpangan/kesenjangan (Faisal 2011), diantaranya perbedaan karakteristik limpahan sumber daya alam, Perbedaan demografi, Perbedaan kemampuan sumber daya manusia, perbedaan potensi lokasi, perbedaan dari aspek aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, perbedaan dari aspek potensi pasar. Kesenjangan wilayah atau yang biasa disebut dengan ketimpangan wilayah memiliki berbagai jenis dan bentuk yang berbeda-beda disetiap wilayah. Menurut Handayani (2006), berbagai ketimpangan suatu wilayah dapat dibedakan menjadi lima bentuk, antara lain, Ketimpangan Ekonomi, Ketimpangan Pengeluaran Konsumsi, Ketimpangan Investasi, Kesenjangan Sosial, Ketidakmerataan dan Kemiskinan.

Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat diukur menggunakan perhitungan indeks ketimpangan regional Williamson, koefisien Gini, ukuran Bank Dunia. Istilah indeks Williamson muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur kesenjangan ekonomi antarwilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang. Secara statistik, indeks Williamson ini adalah *coefficient of variation* yang biasa digunakan untuk mengukur perbedaan. Indeks ini menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Hal yang dipersoalkan bukan antara kelompok kaya dan miskin, tetapi antara daerah maju dan terbelakang. Dari indeks Williamson dapat diketahui kesenjangan ekonomi antarwilayah yang terjadi semakin melebar atau

berkurang. Jika semakin tinggi nilai indeks Williamson, berarti kesenjangan ekonomi antarwilayah semakin besar, dan sebaliknya (Syafrizal, 1997).

$$IW = \sqrt{\sum \frac{(Y_i - y)^2 f_i / n}{y}} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

Y_i = PDRB per kapita di Kabupaten i

Y = PDRB per kapita rata-rata

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten i

n = Jumlah penduduk

Batasan untuk tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah, yaitu:

CVw < 0,35 = Kesenjangan taraf rendah

0,35 ≤ CVw ≤ 0,5 = Kesenjangan taraf sedang

CVw > 0,5 = Kesenjangan taraf tinggi

Apabila kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam suatu negara masih tergolong dalam kesenjangan taraf tinggi, maka harus segera dicari solusi untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi tersebut karena apabila kesenjangan ekonomi antar wilayah dibiarkan semakin tinggi, dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang mengancam rasa persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f c p_i X (f c_1 - f c_{i-1}) \dots\dots\dots (2)$$

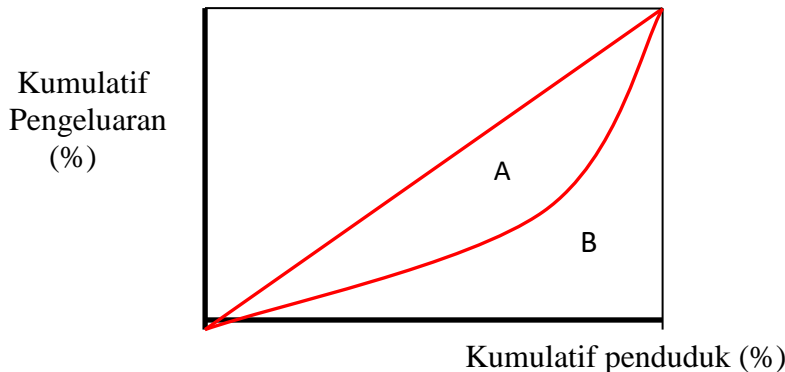
dimana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

f_{p_i} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

f_{c_i} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

f_{c_{i-1}} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)



Gambar 3 Kurva Lorenz

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan

distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- 1) Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen 1. terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- 2) Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen 2. terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- 3) Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen 3. terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

2.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan *multi dimensional*, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Lincoln Arshad, 1999).

Menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi

dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Lincoln Arshad, 1999), secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development* (UNRIS D) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu :

1. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.
2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup.
3. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh *Internasional Labor Organization* (ILO, 1976) sebagai berikut:

Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur: pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural (Lincoln Arshad, 1999).

2.5 Indikator Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk

memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per-kapita per-hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per-kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per-kapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.6 Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno, 2004). Jenis-jenis pengangguran:

- 1) Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

- a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak 5 persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah. Para penganggur ini bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

c. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

2) Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c. Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu termasuk dalam golongan setengah menganggur.

2.7 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Indikator kesejahteraan masyarakat yang hanya didasarkan pada PDB merupakan cara pandang yang terlalu sederhana dalam memahami kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan model yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memasukkan aspek harga lokal ke dalam PDB sehingga menjadi *purchasing power adjusted real PDB*. Formulasi PDB per kapita dengan memperhitungkan daya beli mengakibatkan PDB suatu wilayah menjadi lebih obyektif jika dibandingkan dengan PDB wilayah lain, namun tetap saja bahwa transformasi indikator PDB per kapita berdasarkan daya beli tetaplah dianggap subyektif karena ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sangat ekonomi dan kuantitatif. Hal inilah yang kemudian memunculkan ukuran-ukuran yang baru mengenai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.

Secara umum, teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach* (Sudarsono, 1982:360-361). *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi di mana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. *New contractarian approach* menekankan pada konsep di mana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan satu aspek lebih penting daripada lainnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik.

2.8 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Regional

Prud'homme (1995) menyatakan bahwa titik pandang dari desentralisasi fiskal adalah pada efisiensi. Pendapat lainnya sebagaimana diungkapkan oleh McKinnon (1997), dan Qian dan Wengast (1997), bahwa disparitas regional mungkin berhubungan dengan efisiensi dari pelayanan publik, dan oleh karenanya desentralisasi fiskal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, tetapi juga mengurangi disparitas regional yang sebelumnya terjadi.

Antusiasme atas implikasi ekonomi yang positif dari desentralisasi terganggu oleh keyakinan bahwa distribusi dari manfaatnya secara geografis tidak merata dan bahwa “desentralisasi fiskal yang tidak terkendali kemungkinan besar akan membawa kepada konsentrasi sumber daya pada beberapa lokasi geografis tertentu dan dengan demikian meningkatkan disparitas fiskal di antara pemerintah lokal” (Martinez-Vázquez & McNab, 2003). Meskipun terdapat beberapa klaim bahwa desentralisasi berhubungan dengan pengurangan secara umum atas disparitas teritorial (misalnya Weingast, 1995; McKinnon, 1997; Qian & Weingast, 1997; Shankar & Shah, 2003; Gil, Pascual, & Rapún, 2002), pandangan yang berlaku adalah bahwa transfer kekuasaan dan sumber daya kepada pemerintah lokal secara tidak proporsional menguntungkan daerah-daerah dengan kapasitas yang lebih besar untuk benar-benar memenuhi efisiensi alokasi dan produksi, misalnya: wilayah yang paling makmur, dengan sokongan sumber daya sosial ekonomis yang lebih baik dan kelembagaan yang lebih baik (Cheshire & Gordon, 1998).

Sebagai tambahan, desentralisasi mengurangi kemampuan pemerintah pusat untuk melaksanakan peran sebagai penyeimbang, dan akan membawa kepada perpindahan perkembangan ekonomi dari *peripheries* menuju *cores* (Prud'homme, 1995). Sebab itulah terdapat persepsi yang meluas bahwa desentralisasi dan *territorial inequalities* yang lebih besar adalah dua sisi dari koin yang sama dan bahwa “terdapat tensi yang jelas antara mengejar tujuan-tujuan pemerataan di dalam pelayanan dan desentralisasi dan pilihan yang lebih besar” (Besley & Ghatak, 2003).

Dari berbagai pendapat tadi, terlihat bahwa terdapat 2 kutub pandangan mengenai pengaruh desentralisasi terhadap disparitas pendapatan regional. Pandangan pertama menyatakan bahwa desentralisasi akan mampu mengurangi disparitas tersebut. Namun pandangan lain menyatakan bahwa desentralisasi justru akan meningkatkan disparitas pendapatan antar wilayah, di mana daerah-daerah dengan berbagai keuntungan sosial ekonomi akan diuntungkan dengan adanya desentralisasi fiskal sementara daerah-daerah lainnya hanya memperoleh sedikit manfaat atau malah justru dirugikan.

Gunar Mirdal dalam Roy (2013) mengemukakan bahwa ketimpangan antar daerah dapat disebabkan sebagai akibat dari pengaruh *backwash effect* yang lebih besar dari *spread effect*. Perpindahan tenaga kerja atau migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya karena perbedaan pelayanan publik ataupun karena perbedaan infrastruktur (daerah kaya dan daerah miskin) yang diberikan oleh pemerintah daerah menimbulkan *backwash effect*. Sementara jika terjadi peningkatan *market share* sebagai akibat dari peningkatan produksi sektor tertentu yang akan mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju menyebabkan terjadinya *spread effect*.

Selanjutnya pendapat ini didukung oleh Hirschman (1970) bahwa terjadinya *trickle down effect* dari daerah *core* ke daerah *periphery* yang lebih kecil dari pada *polarization effect* akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah. Prud'homme (1995) menyatakan bahwa dengan membayangkan terjadinya peningkatan ketimpangan antar daerah dalam kompetisi antar daerah disebabkan karena daerah kaya dan miskin mempunyai kemampuan perpajakan yang berbeda, sehingga rata-rata beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat di daerah miskin akan cenderung lebih besar dibanding dengan daerah yang lebih kaya. Hal ini akan menghasilkan lingkaran setan dimana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Dengan argumentasi seperti tersebut diatas, maka kompetisi fiskal seperti itu harus dihilangkan dengan menerapkan sistem sentralisasi melalui sistem bantuan dari pemerintah pusat. MacKinnon (1995) dan Qian dan Weingast (1997) menjelaskan desentralisasi sebagai suatu alat komitmen dan menyatakan bahwa ketimpangan regional

berkaitan dengan efisiensi pelayanan publik. mereka mengarahkan perhatian pada dampak kebijakan yang bersifat insentif dari desentralisasi pada tingkat pemerintah daerah. Dengan anggaran yang terdesentralisasi kebijakan menutupi seluruh pembiayaan daerah yang kurang mampu melalui pembagian sumberdaya dari pemerintah pusat mungkin relatif melemahkan anggaran dan mengganggu insentif daerah untuk keluar dari daerah yang miskin. Sehingga sebenarnya desentralisasi memungkinkan mengurangi ketimpangan antar daerah.

2.9 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Lindahman dan Thurmaier (2002) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat. Mereka menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan *human development index* untuk melihat *basic needs*. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan argumentasi dimana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, walaupun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya ketimpangan antar daerah, ketidakstabilan makroekonomi, dan sebagainya.

Di Indonesia, penelitian yang menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya Hirawan (2005) menyatakan bahwa Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan dalam berbagai aspek di era otonomi daerah. Di bidang pendidikan, misalnya, dorongan pemerintah pusat untuk membangun sekolah-sekolah di setiap daerah telah meningkatkan tingkat pendaftaran (*enrollment rate*) cukup tinggi. Berbagai indikator di bidang kesehatan masyarakat juga menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan selama beberapa tahun terakhir; belanja publik secara riil untuk kesehatan dari tahun 2001-2006 naik hampir 100 persen. Simanjuntak (2010) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah.

2.10 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan

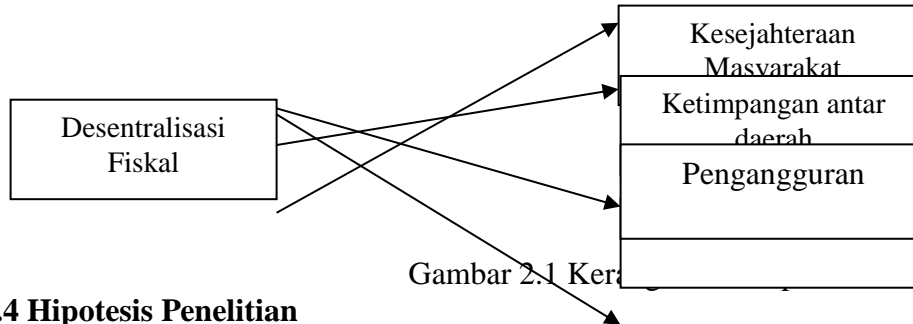
Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Yudhoyono (2004) melakukan penelitian tentang dampak penerapan kebijakan fiskal (pengeluaran dan penerimaan) terhadap pengangguran dan kemiskinan menggunakan pendekatan ekonometrika dengan membangun model sistem persamaan simultan yang terdiri dari 22 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas. Model diduga dengan persamaan 2SLS kemudian hasil pendugaan parameter digunakan untuk melakukan simulasi skenario-skenario kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rejim pemerintahan berpengaruh nyata terhadap kinerja perekonomian. Pemerintahan orde baru cenderung menurunkan PDB dan mengakibatkan kemiskinan meningkat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Fakhru (2007) melakukan penelitian tentang dampak otonomi daerah terhadap pengurangan kemiskinan dengan studi kasus Provinsi Riau. Hasil dari penelitian adalah tingkat kesejahteraan masyarakat Riau terus mengalami peningkatan, kinerja fiskal dan perekonomian daerah serta penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan yang menyentuh langsung dengan rakyat miskin seperti pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan upah, bantuan dan subsidi yang diberikan kepada penduduk miskin langsung maupun tidak langsung berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan.

Hasugian (2006) melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah dan kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat kemandirian daerah sesudah desentralisasi fiskal yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio PAD dan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU). Laju kemiskinan di kabupaten dan kota sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal menunjukkan kenaikan dan penurunan jumlah atau cenderung berfluktuasi.

2.10 Kerangka Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan daerah Kabupaten/Kota di NTB. Kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten/Kota di NTB.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan daerah Kabupaten/Kota di NTB.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat kuantitatif, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan ekonomi antar wilayah, pengangguran dan kemiskinan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yakni seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah daerah Kabupaten/Kota di NTB adalah 10 Kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Bima, Kabupaten Dompo, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 10 kabupaten dan kota di NTB.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat (*cross section*) dan data deret waktu (*time series*) dari tahun 2014-2016.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran masing-masing kabupaten/kota di Daerah NTB pada tahun 2014-2016.

2. Kesejahteraan masyarakat di proksi oleh IPM Kabupaten/Kota di Daerah NTB pada tahun 2014-2016.
3. Pengangguran terbuka di masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah NTB pada tahun 2014-2016.
4. Kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah NTB pada tahun 2014-2016.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Cara-cara yang digunakan dalam pengambilan data adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait. Untuk data desentralisasi fiskal diperoleh dari Departemen keuangan dengan rentang waktu dari tahun 2014-2016. Sedangkan IPM, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik NTB dengan rentang waktu dari tahun 2014-2016. studi pustaka yang dilakukan di Universitas Udayana, dan tulisan dan penggunaan sistem komunikasi internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Berikut ini adalah variabel-variabel penelitian yang digunakan serta pengukurannya.

a. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y1), ketimpangan ekonomi (Y2), Pengangguran (Y3) dan Kemiskinan (Y4).

b. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal (X).

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Desentralisasi fiskal (X) menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran total pendapatan perkapita daerah.
2. Kesejahteraan masyarakat (Y1) adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang dinyatakan dalam satuan indeks. Variabel kesejahteraan masyarakat dalam studi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dalam studi ini data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS. Jadi penulis menggunakan data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebagai data sekunder yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh BPS.
3. Ketimpangan antardaerah diukur dengan menggunakan Indeks ketimpangan Williamson yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional dengan rumusan sebagai berikut (Syafrizal, 1997); (dalam Persentase)

Indeks Wiliamson

Rumus:

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}{\bar{y}}}$$

Dimana :

Yi = PDRB per kapita di Kabupaten i

- Y = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi NTB
- f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten i
- n = Jumlah penduduk di Provinsi NTB

Apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol maka menunjukkan ketimpangan yang makin melebar.

4. Pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengangguran terbuka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik NTB (dalam persentase).
5. Kemiskinan di ukur dengan angka jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (dalam ribuan jiwa).

3.7 Model dan Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel (*pooled data*) merupakan data yang mengkombinasikan antara data deret waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Data deret waktu (*time series*) adalah data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama sembilan tahun. Sedangkan data kerat lintang (*cross section*) adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun. Dalam data panel, observasi dilakukan pada beberapa subjek dianalisis dari waktu ke waktu. Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i \quad ; i = 1, 2, 3, \dots, N \dots\dots\dots (1)$$

di mana N adalah banyaknya data *cross section*. Sedangkan persamaan model dengan time series dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t \quad ; t = 1, 2, 3, \dots, T \dots\dots\dots (2)$$

di mana T adalah banyaknya data *time series*. Sehingga persamaan data panel merupakan pengkombinasian dari persamaan *cross section* dan *time series* dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it} \quad ; i = 1, 2, 3, \dots, N ; t = 1, 2, 3, \dots, T \dots\dots\dots (3)$$

di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah banyaknya data panel. Oleh karena itu, variabel-variabel dalam penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah model, sebagai berikut.

$$Y_1 = \alpha + b_1 X_1 + e \dots\dots\dots (4)$$

$$Y_2 = \alpha + b_2 X_2 + e \dots\dots\dots (5)$$

$$Y_3 = \alpha + b_3 X_3 + e \dots\dots\dots (6)$$

$$Y_4 = \alpha + b_4 X_4 + e \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan:

- Y₁ = IPM (dalam persen)
- Y₂ = ketimpangan (dalam persentase)
- Y₃ = pengangguran (dalam ribuan jiwa)
- Y₄ = kemiskinan (dalam ribuan jiwa)
- X = Desentralisasi fiskal (dalam Jutaan)
- b₁- b₄ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X
- e = Error

Uji determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan desentralisasi fiskal dalam memprediksi variabel kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data diolah dengan bantuan *software Eviews* seri 5.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46'-119°5' Bujur Timur dan 8°10'-9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan: Samudra Hindia
- Sebelah Barat: Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur: Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Desentralisasi Fiskal

Untuk mengetahui perkembangan desentralisasi fiskal daerah 10 Kabupaten/kota di Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Perkembangan Desentralisasi Fiskal Yang Di Proksi ke Total Pendapatan perkapita Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di NTB Tahun 2014-2016 (dalam Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Perkapita Daerah			Rata-rata
	2014	2015	2016	
Bima	2.520.936,78	2.823.108,21	3.391.314,70	2.911.786,5 6
Dompu	4.978.936,43	4.598.382,46	4.560.313,84	4.712.356,5

				7
Lombok Barat				2.069.415,7
	1.932.403,12	1.955.681,24	2.320.162,85	4
Lombok Tengah				1.745.652,5
	1.570.322,95	1.681.066,17	1.985.568,63	8
Lombok Timur				1.698.235,6
	1.468.035,74	1.729.569,47	1.897.101,75	5
Sumbawa				3.031.434,3
	2.644.669,36	2.841.270,27	3.608.363,42	5
Kota Mataram				5.386.999,6
	5.346.473,56	5.677.427,22	5.137.098,04	1
Kota Bima				4.296.108,4
	4.043.797,95	4.085.303,25	4.759.224,15	5
Sumbawa Barat				5.423.601,9
	4.857.235,36	5.613.946,97	5.799.623,44	2
Lombok Utara				2.769.349,5
	2.795.895,93	2.879.702,26	2.632.450,33	1

Sumber: Depkeu, 2016 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata pendapatan perkapita daerah Kabupaten/Kota di NTB selama tahun 2014-2016 berfluktuasi. paling tinggi adalah Kota Mataram mencapai 5,4 juta. hal ini dimaklumi karena Kota Mataram sebagai pusat Ibu Kota Provinsi NTB dan sebagai pusat aktivitas bisnis. Sedangkan pendapatan perkapita daerah terendah adalah Kabupaten Lombok Timur dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar 1,6 juta rupiah. Apabila dilihat per Kabupaten/Kota jumlah pendapatan perkapita daerah terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini lebih disebabkan oleh pemberian bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan terus mengalami kenaikan. Ini berarti pendapatan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di NTB dalam pengelolaan dana masih sangat bergantung dari bantuan pemerintah pusat. Sedangkan PAD sebagai sumber pendapatan asli daerah belum dikelola secara optimal.

4.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 4.2 IPM dibawah ini:

Tabel 4.2 Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota Di NTB Tahun 2014-2016 (Dalam Persentase)

Kabupaten/Kota	IPM	Rata-rata
-----------------------	------------	------------------

	2014	2015	2016	
Bima	62,61	63,48	64,15	63,41
Dompu	63,53	64,56	65,48	64,52
Lombok Barat	63,53	64,62	65,55	64,56
Lombok Tengah	61,88	62,74	63,22	62,61
Lombok Timur	62,07	62,83	63,70	62,86
Sumbawa	62,88	63,91	64,89	63,89
Kota Mataram	75,93	76,37	77,20	76,50
Kota Bima	72,23	72,99	73,63	72,95
Sumbawa Barat	67,19	68,38	69,26	68,27
Lombok Utara	60,17	61,15	62,24	61,18
NTB	64,31	65,19	65,81	65,10

Sumber: www.ntb.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata IPM Kabupaten/Kota di NTB selama tahun 2014-2016 berfluktuasi. Rata-rata jumlah IPM paling tinggi berada di Kota Mataram yang mencapai 76,50. hal ini dimaklumi karena Kota Mataram sebagai pusat Ibu Kota Provinsi NTB dan sebagai pusat pendidikan dan aktivitas bisnis. Sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Lombok Utara dengan rata-rata IPM sebesar 61,18. Hal ini disebabkan disamping kabupatennya baru terbentuk pada tahun 2008 juga disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas di bidang pendidikan seperti masih rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan masih rendahnya prasarana sekolah penunjang pendidikan, kesadaran pentingnya kesehatan yang masih rendah dan rendahnya penghidupan yang layak. Apabila dilihat per Kabupaten/Kota IPM terus mengalami kenaikan, namun masih rendah.

4.2.3 Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah

Untuk mengetahui perkembangan ketimpangan ekonomi antarwilayah pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB penelitian ini menggunakan pendekatan Indeks Williamson untuk melihat besarnya ketimpangan antardaerah. Hal dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Ketimpangan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di NTB Tahun 2014-2016

Kabupaten/Kota	Ketimpangan			Rata-rata
	2014	2015	2016	

Bima	0,60	0,50	0,54	0,54
Dompu	0,44	0,37	0,32	0,37
Lombok Barat	0,56	0,50	0,40	0,48
Lombok Tengah	0,60	0,54	0,50	0,54
Lombok Timur	0,64	0,85	0,86	0,78
Sumbawa	0,84	0,76	0,60	0,73
Kota Mataram	0,78	0,77	0,43	0,66
Kota Bima	0,20	0,10	0,20	0,17
Sumbawa Barat	0,20	0,26	0,20	0,22
Lombok Utara	0,31	0,31	0,36	0,32
NTB	0,40	0,46	0,45	0,43

Sumber: BPS, 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas ketimpangan ekonomi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat relatif tinggi, keadaan ini menunjukkan perekonomian di Kabupaten/Kota di provinsi ini belum merata. Nilai indeks williamson dari tahun 2014-2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung berfluktuasi. Penyebab kesenjangan ekonomi di Nusa Tenggara Barat adalah rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan karakteristik kepulauan membutuhkan biaya pembangunan lebih besar untuk membangun infrastruktur penunjang seperti transportasi dan energi.

Indikasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi, Karakteristik daerah kepulauan mengakibatkan banyak warga yang sukar dicapai oleh sarana dan prasarana sosial ekonomi. Keterbatasan jalan membuat warga sukar untuk saling berhubungan dan memperoleh pelayanan yang seharusnya disediakan pemerintah.

4.2.4 Pengangguran

Untuk mengetahui perkembangan tingkat pengangguran terbuka pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di NTB Tahun 2014-2016 (dalam Ribuan)

Kabupaten/Kota	Pengangguran Terbuka	Rata-rata
-----------------------	-----------------------------	------------------

	2014	2015	2016	
Bima	9.184	8.345	6.308	7.945,67
Dompu	4.474	5.699	5.572	5.248,33
Lombok Barat	11.185	12.202	10.381	11.256,33
Lombok Tengah	25.387	29.115	32.300	28.934,00
Lombok Timur	30.578	38.231	33.528	34.934,00
Sumbawa	8.729	9.361	9.132	9.074,00
Kota Mataram	3.277	9.530	15.794	9.533,67
Kota Bima	9.522	6.736	7.804	8.020,67
Sumbawa Barat	3.842	3.538	5.244	4.208,00
Lombok Utara	6.530	4.953	2.313	4.598,67

Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di NTB selama tahun 2014-2016 berfluktuasi. Rata-rata jumlah pengangguran terbuka paling tinggi berada di Kabupaten Lombok Timur mencapai 34.934 ribu orang. Sedangkan pengangguran terbuka terendah berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan rata-rata jumlah pengangguran terbuka sebesar 4.208 ribu orang. Tingginya pengangguran di Lombok Timur disebabkan kurang tersedianya lapangan kerja sementara jumlah penduduk terus mengalami kenaikan. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB, Kabupaten lombok Timur memiliki jumlah penduduk yang paling besar.

4.2.5 Kemiskinan

Untuk mengetahui perkembangan garis kemiskinan pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 4.5 IPM dibawah ini:

Tabel 4.5 Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di NTB Tahun 2014-2016 (rupiah/perkapita)

Kabupaten/Kota	Kemiskinan			Rata-rata
	2014	2015	2016	
Bima	74540	73710	72360	73.536,67
Dompu	36421	35940	34310	35.557,00

Lombok Barat	110745	113300	110850	111.631,6 7
Lombok Tengah	145177	147940	145370	146.162,3 3
Lombok Timur	219665	222190	216180	219.345,0 0
Sumbawa	73858	73570	71660	73.029,33
Kota Mataram	46673	46760	44810	46.081,00
Kota Bima	15312	15700	15420	15.477,33
Sumbawa Barat	22039	22500	22470	22.336,33
Lombok Utara	72192	72280	71020	71.830,67
NTB	816622	823890	804450	814.987,3 3

Sumber: www.ntb.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata kemiskinan di NTB selama tahun 2014-2016 sebesar 814.987,33 ribu rupiah. Apabila dilihat menurut Kabupaten/Kota jumlah kemiskinan terus mengalami penurunan. Jumlah kemiskinan paling tinggi ada di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 216.180 ribu jiwa. Hal ini dimaklumi karena Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di NTB. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah di Kota Bima dengan jumlah penduduk miskin sebesar 15420 ribu jiwa. Kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi.

5.3 Analisis Data

Berdasarkan olah data pada Lampiran 2, maka diperoleh hubungan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bentuk persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y_1 = 57,56 + 2,50(X_1) + e \dots\dots\dots (8)$$

$$Sd = (1.62) \quad (4.42)$$

$$T_{hit} = (35.399) \quad (5.65)$$

$$Sig = (0.000) \quad (0.000)$$

$$R^2 = 51,68$$

Dimana:

Y_1 = Kesejahteraan Masyarakat (IPM) dalam Persentase

X_1 = Desentralisasi fiskal (dalam juta rupiah)

e = error

Variabel desentralisasi fiskal (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah yang positif yaitu sebesar 4,42 dan nilai $0.000005 \leq \alpha = 0.05$, artinya jika Desentralisasi fiskal naik sebesar satu juta rupiah maka, akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 4,42 persen.

Hasil olah data arah hubungan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan ekonomi dalam bentuk regresi sederhana sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= 0.69 & - & 6,2(X_2) + e \dots\dots\dots (9) \\
 Sd &= (0.095) & & (2.59) \\
 T_{hit} &= (7.33) & & (-2.429) \\
 Sig &= (0.000) & & (0.0218) \\
 R^2 &= 17,40
 \end{aligned}$$

Dimana:

Y_1 = Ketimpangan Eonomi (dalam Persentase)

X_1 = Desentralisasi fiskal (dalam juta rupiah)

e = error

Variabel Desentralisasi Fiskal (X_2) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi dengan arah yang negatif sebesar 6,2 dan nilai $0,0218 \leq \alpha = 0.05$, artinya jika desentralisasi fiskal naik sebesar satu juta rupiah maka akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi menurun sebesar 6,2 persen.

Hasil olah data arah hubungan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran dalam bentuk regresi sederhana sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y_3 &= 28.017 & - & 4.62(X_3) + e \dots\dots\dots (10) \\
 Sd &= (3.915) & & (1.06) \\
 T_{hit} &= (7.155) & & (-4.340737) \\
 Sig &= (0.000) & & (0.0002) \\
 R^2 &= 40,22
 \end{aligned}$$

Dimana:

Y_3 = pengangguran (dalam ribuan jiwa)

X_3 = Desentralisasi fiskal (dalam juta rupiah)

e = error

Variabel desentralisasi fiskal (X_3) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan arah yang negatif yaitu sebesar 4,62 dan nilai $0.000002 \leq \alpha = 0.05$, artinya jika Desentralisasi fiskal naik sebesar satu juta rupiah maka akan mengakibatkan tingkat pengangguran menurun sebesar 4,62 ribu jiwa.

Hasil olah data arah hubungan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dalam bentuk regresi sederhana sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y_4 &= 199942.0 & - & 0.034(X_4) + e \dots\dots\dots (11) \\
 Sd &= (17205.99) & & (0.004) \\
 T_{hit} &= (11.62049) & & (-7.44) \\
 Sig &= (0.000) & & (0.000) \\
 R^2 &= 66,41
 \end{aligned}$$

Dimana:

Y_4 = Kemiskinan (dalam ribu jiwa)

X_4 = Desentralisasi fiskal (dalam juta rupiah)

e = error

Variabel Desentralisasi Fiskal (X_4) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan arah yang negatif sebesar 0,034 dan nilai $0,000 \leq \alpha = 0,05$, artinya jika desentralisasi fiskal naik sebesar satu juta rupiah maka akan mengakibatkan kemiskinan turun sebesar 0,034 ribu jiwa.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil pengukuran koefisien determinasi pada arah hubungan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat memperlihatkan nilai R^2 sebesar 51,68. Hal ini mengindikasikan bahwa 51,68 persen variasi dalam kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal. Sedangkan sisanya sebesar 48,32 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian seperti pertumbuhan ekonomi, rasa nyaman, keamanan dan lain-lain.

Hasil pengukuran koefisien determinasi pada arah hubungan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ekonomi memperlihatkan nilai R^2 sebesar 17,40. Hal ini mengindikasikan bahwa 17,40 persen variasi dalam ketimpangan ekonomi dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal. Sedangkan sisanya sebesar 82,60 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian seperti perbedaan SDM, SDA, infrastruktur antar daerah dan lain-lain.

Hasil pengukuran koefisien determinasi pada arah hubungan desentralisasi fiskal terhadap pengangguran memperlihatkan nilai R^2 sebesar 40,22. Hal ini mengindikasikan bahwa 40,22 persen variasi dalam pengangguran dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal. Sedangkan sisanya sebesar 59,78 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian seperti rendahnya kualitas SDM, kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan lain-lain.

Hasil pengukuran koefisien determinasi pada arah hubungan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan memperlihatkan nilai R^2 sebesar 66,41. Hal ini mengindikasikan bahwa 66,41 persen variasi dalam kemiskinan dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal. Sedangkan sisanya sebesar 33,59 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, kurangnya kesadaran tentang perilaku hidup sehat, kurangnya lapangan kerja yang tersedia, tingkat pendidikan yang rendah dan lain-lain.

5.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data diatas, dapat diketahui bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan pada Kabupaten/Kota di NTB atau dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki kemampuan mendorong kenaikan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan. Hasil temuan ini juga di dukung oleh hipotesis yang diajukan sebelumnya yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan.

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lindahman dan Thurmaier (2002) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat. Hasil kajian empirik menemukan bahwa

desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi dimana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Temuan lainnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudhoyono (2004) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pengangguran yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan.

Signifikannya desentralisasi fiskal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, pengangguran dan kemiskinan di provinsi NTB di sebabkan karena masih dominannya pemberian transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan seperti dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah di NTB. Keadaan ini dapat diketahui dari perhitungan besarnya kontribusi dana perimbangan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2014-2016 hampir mencapai 70 persen dari total pendapatan daerah disusul oleh kontribusi PAD sebesar 9 persen dari total penerimaan daerah (lampiran 2). Walaupun transfer dana masih bergantung dari pemerintah pusat tetapi penggunaan dana tersebut ternyata mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB seperti perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur daerah dan standar hidup yang layak. Hal ini terlihat dari IPM yang menjadi acuan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan. Selain itu, alokasi dana transfer dari pusat ke daerah mampu menekan tingkat disparitas pendapatan antar wilayah. Dengan adanya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka daerah yang lemah akan kekuatan fiskalnya mampu dibantu untuk menutupi celah pendanaan di daerahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan pada Kabupaten/Kota di NTB. Hal ini disebabkan karena masih dominannya pemberian transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan seperti dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana alokasi khusus yang mencapai 70 persen dan kontribusi PAD mencapai 9 persen kepada pemerintah daerah di NTB selama periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy W. dan Johannes Linn, (1992), *Urban Public Finance in Developing Countries*, New York Oxford University Press.
- Barro, Robert (1991). *"Economic Growth in a Cross Section of Countries"*. The Quarterly Journal of Academic: 407-443
- Bhalla, S. (1994). *"Freedom and Economic Growth: A Virtuous Circle"*. Nobel Symposium Democracy's Victory and Crisis. Uppsala University.
- Bird, Richard M (1993). *"Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal*

Decentralization". National Tax Journal 46 (3): 207-227

- Bird, Richard M., Robert Ebel dan Christine Wallich (1995). "*Decentralization of the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition Economics*". Washington DC, World Bank
- Bird, R. M. dan F. Vaillancourt (2000). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. terjem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Boediono (2009). *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana? (Kumpulan Esai Ekonomi)*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Bekerjasama dengan Freedom Institute.
- Brojonegoro, Bambang (2006). "*Desentralisasi Sebagai Kebijakan Fundamental untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan Antar daerah di Indonesia*". Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Faisal Tamin, (1998), *Reformasi dan Reorientasi Paradigma Otonomi Daerah (Makalah)*, Seminar HMI Cab. Malang.
- Halim, Abdul, (2002), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit YPKN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul (2001), *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : AMP YKPN.
- Hidayat, S (2004). *Desentralisasi: Tinjauan Literatur Tentang Konsep Dasar Pengalaman Negara Lain dan Dinamika Kebijakan Di Indonesia*. Dalam Susanto (penyunting), *Otonomi Daerah: Teori dan Kenyataan Empiris*. PPE-LIPI, Jakarta.
- Hidayat, Syarif, (2005). *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Jhingan, M.L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Dalam Guritno (Penerjemah). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP-APN-YKPN, Yogyakarta.
- Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid, and Bird, Richard, 1998. *Decentralization in Developing Country*. The World Bank, Washington, DC.
- Mardiasmo, (2009), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

- Oates, Wallace E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovic. Also published in format of Paperback Edition 2011. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Prud'homme, Remy, (1995). *On The Danger of Decentralization*, Washington DC, The World Bank, Policy Research Working Paper, 1252.
- Samuelson, Paul A, dan Nordhaus. (1994). *Pembangunan Ekonomi* (edisi terjemahan). Edisi ke 12. Jakarta: Erlangga.
- Sidik, M. 2002. *Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dalam seminar nasional Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta, 20 April 2002.
- Suhartono, H. (2005). *Signifikansi Peran Transfer Fiskal dalam Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah di Wilayah Jawa Bagian Barat* [Tesis]. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE-UI.
- Sasana, Hadi. (2011), "*Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*" *Dinamika Pembangunan*, Vol.3,h. 145–170. Diakses tanggal 26 November 2011.
- Hirawan, (2007). *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Martinez Vazquez, Jorge M. and McNab, R. (2001). "*Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Democratic Governance*". Working Paper, Oktober, 1-41.
- Zhang, Tao dan Zhou, Heng-fu. (1998). *Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China*. *Journal of Public Economics*, 67, 221- 240. Elsevier Science S.A.
- Wibowo, Puji (2008). "*Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Hal. 55-83.
- World Bank (1997a). *The World Development Report*. New York: Oxford University Press.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonom*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sasana, H. (2009). *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota*

Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10 (1) : 103 -124.

Sinaga, B.M., Sitepu R.K., 2006. *Aplikasi Model Ekonometrika*. IPB. Bogor.

Todaro, Michael P. dan Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Penerjemah: Haris Munandar. Erlangga, Jakarta.

Usman. (2006). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan* [Tesis]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Wibowo, A. (2008). *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Keuangan Publik*, 5 (1) : 55 – 83.

Yudhoyono, S. B. (2004). *Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal* [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Zhang, Tao dan Zou Heng-fu (1998). "*Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China*". *Journal of Public Economics* 67, 221-240.